



Mas Hara | Disruptor Handal [@hnirankara](#)

Apr 08 · 9 tweets

Presiden Tua Bangka dan Operasi Intelijen

Di tengah chaos kebijakan Indonesia pasca Pilpres 2024, sosok Prabowo Subianto, yang kini menjabat sebagai presiden, menjadi target utama amarah rakyat karena kebijakannya yang dinilai bertentangan dengan semangat reformasi. Pada usia 73 tahun, Prabowo memimpin negara dengan latar belakang militernya sebagai pelanggar HAM, serta dengan kontroversi yang tidak pernah surut.

Pertemuan Prabowo dengan pemred-pemred melalui wawancara di Hambalang pada 6 April 2025, yang disiarkan oleh beberapa media, salah satunya Narasi Newsroom, menjadi titik balik yang kembali memicu keresahan publik. Dalam wawancara tersebut, Prabowo tampak kehilangan arah, seolah-olah ia kekurangan informasi penting, bahkan untuk isu sekrusial RUU TNI yang sedang mengguncang stabilitas sosial.

Publik pun mulai bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang presiden, yang seharusnya memiliki akses tidak terbatas ke informasi negara, bisa tampil begitu tidak siap? Keresahan ini diperparah oleh fakta bahwa telepon seluler Prabowo selalu dipegang oleh ajudannya, Teddy Indra Wijaya, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Kabinet.

Spekulasi liar pun bermunculan, apakah Prabowo sedang menjadi target operasi intelijen yang dirancang untuk "mengunci mati" dan melemahkan posisinya sebagai presiden?

Di balik semua ini, ada benang merah yang mengarah pada dinamika politik yang jauh lebih dalam, melibatkan Joko Widodo Jokowi, rival Prabowo dalam dua Pilpres sebelumnya, yang kini diyakini memiliki pengaruh besar atas kemenangan Prabowo pada Pilpres 2024. Teddy dulunya adalah orang kepercayaan Jokowi yang kini berada di lingkaran terdekat Prabowo, sehingga memunculkan dugaan bahwa ada operasi intelijen yang sengaja menjadikan Prabowo sebagai boneka politik, sementara agenda Jokowi dan oligarki di belakangnya terus berjalan.

-Sebuah Esai Konspirasi-

...

GOBLOKBERJAMAAH

Ditulis oleh Hara Nirankara



PRESIDEN TUA BANGKA DAN OPERASI INTELIJEN

Naskah RUU TNI, Karangan atau Ketidaktransparanan?

Wawancara yang berlangsung di Hambalang, menjadi panggung yang memperlihatkan kelemahan Prabowo dalam merespons isu sensitif. Ketika ditanya tentang RUU TNI yang memicu gelombang demonstrasi, Prabowo dengan enteng menyebut bahwa naskah yang beredar di publik sebagai "karangan." Pernyataan ini langsung di-counter oleh Najwa Shihab, yang menegaskan bahwa masyarakat sipil kesulitan mengakses naskah asli RUU TNI di situs DPR. Statement Prabowo tadi hanya sebagai pintu pembuka, bahwa di dalam pemerintahan Prabowo, transparansi dalam penyusunan kebijakan bukanlah konsumsi

publik. Fakta ini bukan sekadar hal yang kecil, melainkan cerminan dari ketidaktransparanan proses legislasi yang telah memicu kemarahan publik.

Menurut laporan dari Puskapa Hukum dan Konstitusi (PSHK) pada 2025, RUU TNI tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024, dan pengesahannya pada 24 Maret 2025 memicu aksi demonstrasi di berbagai kota, termasuk Surabaya, yang berakhir ricuh dengan 20 orang ditangkap (BBC, 2025). Ketidaktransparanan ini seharusnya menjadi perhatian utama seorang Presiden, tetapi Prabowo justru tampak tidak mengetahui fakta dasar yang terjadi di lapangan, khususnya tentang aksi massa. Pernyataannya yang menyebut naskah sebagai "karangan" tanpa memberikan solusi atas masalah transparansi, menunjukkan bahwa Prabowo tidak memiliki informasi yang memadai.

Seorang Presiden seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan proses legislasi berjalan secara demokratis, tetapi Prabowo malah terlihat terisolasi dari realitas. Kegagalan ini memunculkan pertanyaan lagi, apakah ketidaktahuan Prabowo ini murni karena kelalaian, atau ada pihak yang sengaja membatasinya dari informasi penting? Jawaban atas pertanyaan ini mungkin terletak pada dinamika di balik layar, yang melibatkan orang-orang terdekatnya.

Peran Teddy, Gerbang Informasi yang Terkunci

Jawaban Prabowo yang terkesan plin-plan dalam wawancara itu bukanlah sebuah kebetulan, karena Prabowo sendiri tidak memegang telepon selulernya di mana seharusnya telepon seluler merupakan barang pribadi Prabowo. Telepon tersebut selalu berada di tangan Teddy Indra Wijaya, ajudannya yang juga menjabat sebagai Sekretaris Kabinet sejak Oktober 2024. Bahkan, pihak keluarga yang ingin menghubungi Prabowo harus melalui Teddy terlebih dahulu, menurut penuturan Bocor Alus Politik Tempo.

Dalam era digital, di mana informasi mengalir dengan sangat cepat melalui smartphone, ketergantungan Prabowo pada Teddy sebagai "gerbang informasi" menciptakan celah yang sangat berbahaya.

Menurut laporan dari Council on Foreign Relations (2025), smartphone telah mengubah lanskap intelijen, baik sebagai sumber informasi maupun titik lemah. Smartphone dapat digunakan untuk mengumpulkan data, memanipulasi informasi, atau bahkan menjadi target peretasan. Dengan menyerahkan teleponnya kepada Teddy, Prabowo mungkin

berpikir bahwa ia melindungi diri dari ancaman siber (penyadapan), mengingat seorang presiden adalah target utama serangan siber. Namun, ini juga berarti bahwa Teddy memiliki kendali penuh atas informasi yang diterima oleh Prabowo, termasuk pesan, laporan, atau notifikasi berita yang masuk.

Di dalam teori intelijen, peran Teddy bisa disebut sebagai information control, di mana seorang gatekeeper dapat memfilter atau menahan informasi untuk mempengaruhi persepsi dan keputusan target (Prabowo). Jika Teddy membatasi informasi yang sampai kepada Prabowo, maka Presiden berada dalam posisi yang sangat rentan, terisolasi dari realitas yang sebenarnya. Ketidaktahuan Prabowo tentang detail RUU TNI, seperti yang terlihat dalam wawancara, bisa jadi bukan karena Prabowo tidak peduli, melainkan karena ia tidak diberi akses penuh terhadap informasi yang seharusnya dia ketahui.

Teddy, Ajudan atau "Agen Jokowi"?

Keresahan ini semakin dalam ketika kita melihat latar belakang Mayor Teddy, dimana sebelum menjadi ajudan Prabowo, Teddy adalah orang kepercayaan Mulyono, rival Prabowo sendiri dalam Pilpres 2014 dan 2019. Menurut BAP Tempo, Teddy pernah menjabat sebagai Asisten Ajudan Presiden Jokowi sebelum dipercaya (atau ditempatkan) untuk menjadi ajudan Prabowo saat dirinya menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Setelah Prabowo dilantik sebagai presiden pada Oktober 2024, Teddy diangkat sebagai Sekretaris Kabinet, posisi yang sangat strategis di dalam pemerintahan.

Nah, untuk fakta lain yang tidak bisa kita abaikan yaitu, kemenangan Prabowo pada Pilpres 2024 sangat bergantung pada dukungan Jokowi. Menurut laporan dari The Diplomat (2025), Jokowi, yang tidak dapat mencalonkan diri lagi karena batas masa jabatan, secara implisit mendukung Prabowo dengan mengusung putranya, Fufufafa, sebagai Wakil Presiden. Dukungan ini diperkuat dengan popularitas Jokowi, yang masih tinggi di kalangan masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Centre for Strategic and International Studies (2025). Namun, dukungan ini tidaklah gratis, di mana terdapat spekulasi-spekulasi yang muncul bahwa Jokowi, menggunakan kemenangan Prabowo untuk memastikan kelangsungan agenda politiknya, dan Teddy bisa menjadi "agen Jokowi" di dalam pemerintahan Prabowo.

Jika dilihat dari kacamata atau teori intelijen, langkah Jokowi melalui Teddy disebut sebagai proxy influence, di mana pihak tertentu menggunakan perantara untuk memengaruhi target. Jika Teddy masih memiliki loyalitas kepada Jokowi, ia dapat

bertindak sebagai gatekeeper yang membatasi informasi kepada Prabowo, sehingga Presiden tidak memiliki kebebasan penuh untuk membuat keputusan. Nah pada jawaban Prabowo dalam wawancara, yang terkesan kekurangan informasi, menjadi indikasi bahwa dia mungkin sedang "disandera" oleh agenda Jokowi melalui Teddy. Posisi Teddy sebagai Sekretaris Kabinet, memberikan kekuatan tambahan untuk mempengaruhi kebijakan, menjadikannya sosok kunci dalam operasi intelijen yang mungkin sedang berlangsung.

Proyek Jokowi dan Titipan Oligarki

Spekulasi bahwa Prabowo "tersandera" oleh Jokowi semakin kuat, terutama saat kita melihat bahwa memang, proyek-proyek besar Jokowi banyak yang belum selesai. Salah satu proyek utama adalah Ibu Kota Nusantara (IKN), yang bernilai 30 miliar USD. Menurut The Diplomat (2025), IKN menghadapi banyak masalah, seperti pendanaan, keterlambatan infrastruktur, dan kurangnya minat dari pegawai negeri untuk pindah. Jokowi bersikeras agar proyek ini selesai, tetapi ada ketegangan dengan Prabowo karena perbedaan prioritas kebijakan. Selain IKN, ada juga proyek-proyek titipan oligarki, sebut saja PIK 2 sebagai salah satu contohnya, di mana proyek-proyek itu melibatkan kepentingan elit bisnis yang dekat dengan Jokowi selama dua periode kepemimpinannya.

Kemenangan Prabowo yang didukung oleh Jokowi, tentunya menimbulkan spekulasi bahwa ia terikat oleh komitmen politik untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut. Nah dalam teori intelijen yang lain, "keterikatan" itu disebut sebagai political leverage, di mana pihak tertentu menggunakan pengaruh politik untuk mengontrol target. Jika Prabowo gagal memenuhi komitmen ini, ia berisiko kehilangan dukungan dari faksi Jokowi, yang masih memiliki pengaruh besar di dalam perpolitikan Indonesia. Dengan menempatkan Teddy sebagai Sekretaris Kabinet, Jokowi dapat memastikan bahwa agenda politiknya tetap berjalan, bahkan jika itu berarti dengan "menyandera" Prabowo dalam posisi yang sulit.

Ketergantungan Prabowo pada dukungan Jokowi menciptakan dinamika yang rumit, kenapa? Jika Prabowo memprioritaskan proyek-proyek Jokowi, ia mungkin kehilangan dukungan dari basis pendukungnya sendiri, yang menginginkan perubahan. Sebaliknya, jika Prabowo menolak melanjutkan agenda Jokowi, ia berisiko memicu konflik dengan faksi yang masih setia kepada Mulyono. Dalam situasi ini, Prabowo tampak seperti Presiden yang tidak benar-benar bebas, melainkan terjebak dalam jaringan kepentingan yang lebih besar.

RUU TNI, Strategi untuk Melemahkan Prabowo?

Kontroversi RUU TNI menjadi titik krusial dalam tulisan saya kali ini, di mana RUU TNI, yang sudah disahkan pada 20 Maret 2025 (koreksi kalau salah), memicu gelombang penolakan dari masyarakat sipil karena dianggap memperluas kewenangan TNI tanpa pengawasan yang memadai. Menurut laman BBC (2025), aksi demonstrasi di berbagai kota berlangsung represif, dengan paramedis yang ikut berdemonstrasi juga menjadi korban kekerasan aparat. Dukungan Prabowo terhadap RUU ini, seperti yang terlihat dalam wawancara, membuatnya tampak tidak peka terhadap aspirasi masyarakat sipil, yang pada akhirnya memperburuk persepsi publik terhadap kepemimpinannya.

Spekulasi pun muncul bahwa RUU TNI sengaja didorong untuk melemahkan Prabowo, karena “isu”nya, di dalam tubuh militer sendiri, ada ketidakpuasan bahkan rasa benci terhadap Prabowo, yang memiliki sejarah kontroversial, termasuk keterkaitannya dengan penculikan aktivis pada 1998. Dalam teori Legislative Sabotage, terdapat sebuah kondisi di mana pihak tertentu mendorong legislasi untuk menciptakan ketidakstabilan atau melemahkan target. UU TNI yang baru dapat digunakan untuk memecah belah dukungan terhadap Prabowo, baik di kalangan masyarakat sipil (yang menolak UU tersebut) maupun di kalangan militer (yang mungkin mendukung perluasan kewenangan, tetapi tidak menyukai Prabowo sebagai pemimpin).

Nah dengan memicu krisis sosial melalui UU TNI yang baru, pihak-pihak tertentu, baik dari faksi Jokowi, oposisi politik, atau bahkan agen intelijen asing, dapat memanfaatkan situasi untuk melemahkan Prabowo. Ketegangan geopolitik, seperti yang disebutkan dalam Intelligence Online (2025), bahwa hubungan Indonesia dengan Prancis melemah sejak Prabowo menjadi Presiden, “mungkin saja” dapat menjadi motif bagi pihak asing untuk menciptakan ketidakstabilan melalui legislasi kontroversial ini. UU TNI yang baru, dengan segala kontroversinya, menjadi alat yang sempurna untuk menempatkan Prabowo dalam posisi yang semakin terjepit.

Prabowo sebagai Target Pemberontakan Rakyat?

Di balik kekisruhan semua ini, terdapat sebuah spekulasi yang lebih gelap, di mana operasi intelijen yang menargetkan Prabowo “mungkin” dirancang untuk memicu pemberontakan rakyat. Dalam teori Divide and Conquer, disebutkan bahwa ada pihak tertentu yang sengaja menciptakan konflik untuk melemahkan target (Prabowo). Dengan membatasi informasi melalui Teddy, mendorong legislasi kontroversial seperti UU TNI yang baru, dan memanfaatkan ketegangan sosial, Prabowo sengaja dibuat lemah di mata

publik. Tujuannya? Memicu aksi massa yang dapat menurunkan Prabowo dari kekuasaan.

Jika Prabowo diturunkan melalui aksi massa, maka yang akan naik sebagai pengganti adalah Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Skenario tadi jelas sangat menguntungkan bagi Jokowi dan faksi pendukungnya, karena Gibran dapat melanjutkan agenda politik ayahnya dengan lebih leluasa. Operasi intelijen ini, jika benar terjadi, adalah contoh sempurna dari influence operation, di mana informasi dimanipulasi, krisis diciptakan, dan target dilemahkan secara sistematis untuk mencapai tujuan politik yang lebih besar.

Keterlibatan Teddy sebagai "agen Jokowi" dalam operasi ini menjadi kunci, dengan posisinya sebagai gatekeeper informasi, Teddy dapat memastikan bahwa Prabowo tetap terisolasi dari realitas, sehingga ia terus membuat keputusan atau pernyataan yang memicu kemarahan publik. Sementara itu, UU TNI yang baru menjadi katalis untuk mempercepat krisis, membuka jalan bagi skenario pemberontakan rakyat yang pada akhirnya menguntungkan faksi Jokowi dan oligarki di belakangnya.

Tapi, andaikan aksi massa dimanfaatkan oleh pihak tertentu sehingga fufufafa yang naik, bukankah sangat tanggung? Maka dari itu, sekalian saja jegal Gibran agar tidak naik menggantikan Prabowo. Atau, bagaimana jika Prabowo (diasumsikan pura-pura mengikuti permainan Jokowi), melengserkan Gibran dari posisinya? Bukankah ada mekanisme di dalam konstitusi kita? Hehe.

Penutup

Prabowo Subianto, yang saya sebut sebagai "Presiden Tua Bangka", tampaknya sedang berada dalam posisi yang sangat rentan. Ketidaktahuannya tentang detail naskah RUU TNI yang memicu kemarahan publik, ketergantungannya pada Teddy sebagai gerbang informasi, dan keterikatannya pada agenda Jokowi menunjukkan bahwa Prabowo, mungkin sedang menjadi target operasi intelijen yang cermat dan licik.

Spekulasi bahwa Teddy adalah "agen Jokowi" yang menyandera Prabowo, serta RUU TNI sebagai alat untuk melemahkan posisinya, bukanlah sekadar teori konspirasi melainkan sebuah kemungkinan nyata yang didukung oleh fakta dan teori intelijen seperti proxy influence, political leverage, dan divide and conquer.

Skenario terburuk dari operasi ini yaitu pemberontakan rakyat yang dapat menurunkan

Prabowo, membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk naik sebagai Presiden, sebuah langkah yang akan memastikan kelangsungan agenda Jokowi dan oligarki di belakangnya. Namun, tanpa bukti konkret, spekulasi ini tetap menjadi tanda tanya besar yang mengundang diskusi lebih lanjut. Apakah Prabowo benar-benar "tersandera" oleh operasi intelijen? atau apakah ini hanya cerminan dari kelemahan kepemimpinannya sendiri?.

Pertanyaan di atas tidak hanya relevan bagi masa depan Prabowo, tetapi juga bagi stabilitas politik Indonesia secara keseluruhan. Publik perlu untuk terus mengawasi dinamika ini, karena di balik layar kekuasaan, operasi intelijen sering kali berjalan tanpa sepengetahuan kita.

Mari kita buka diskusi, "Apakah kalian percaya bahwa Prabowo sedang menjadi korban operasi intelijen? atau, apakah ini hanya bagian dari permainan politik yang lebih besar?"

Ditulis oleh Hara Nirankara

Daftar Pustaka:

BBC. (2025). Gelombang Demonstrasi Tolak RUU TNI, Aksi di Surabaya Berakhir Ricuh.

Bocor Alus Politik Tempo. Lupa episode yang mana 🤔

Centre for Strategic and International Studies. (2025). From Populist Pariah to "Jokowi's Man": Analyzing Prabowo Subianto's Transformation in the Lead-up to the 2024 Indonesian Elections.

Council on Foreign Relations. (2025). Why Military Leaders Need to Rethink Battlefield Intelligence in a Smartphone Era.

Intelligence Online. (2025). Paris-Jakarta Ties Weaken Under Prabowo Presidency.

Puskapa Hukum dan Konstitusi (PSHK). (2025). RUU TNI: Ketidaktransparanan dan Penolakan Masyarakat Sipil.

The Diplomat. (2025). Jokowi's Legacy and the 2024 Indonesian Election.

Source: <https://x.com/hnirankara/status/1909516622437794154>

Thread: <https://twitter-thread.com/t/1909516622437794154>